

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

# LAPORAN KINERJA INSTANSI

# PEMERINTAH (LKJIP)

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



2025



[dkp.pekalongankota.go.id](http://dkp.pekalongankota.go.id)  
[dkpktapekalongan@gmail.com](mailto:dkpktapekalongan@gmail.com)  
Jl. W.R Supratman no 77, Panjang  
Wetan, Pekalongan Utara, Kota  
Pekalongan 51141



# KATA PENGANTAR

**P**uji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Pekalongan Tahun 2025, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan, sasaran strategis dan program berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan selama tahun anggaran 2025. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien, dan berkelanjutan di masa yang akan datang.

Terima kasih kepada seluruh jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan yang telah ikut berkontribusi aktif dan positif dalam pencapaian kinerja melalui pencapaian tujuan, sasaran strategis dan program yang menjadi tanggung jawab Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan. Kami menyadari bahwa Laporan ini masih sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dari semua pihak. Semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Pekalongan, 14 Januari 2026  
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Kota Pekalongan

**BAMBANG SUGIARTO, S.T., M.M.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19710304 199903 1 011

# IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025. Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun 2025 memiliki 2 (dua) sasaran strategis dengan total 2 (dua) indikator kinerja, dan 2 (dua) target kinerja yang harus dicapai.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun 2025 dapat dikatakan **Sangat Berhasil**. Capaian kinerja pemerintahan Dinas Kelautan dan Perikanan ini didasarkan pada hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.

Selanjutnya hasil analisis terhadap 2 (dua) sasaran strategis yang dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan, adalah sebagai berikut:

1. Indikator nilai SAKIP OPD target yang ditetapkan 83,17.  
Berdasarkan penilaian SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pekalongan, bahwa untuk penilaian Tahun 2024 nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan sebesar **83,27** dengan predikat A. Sehingga capaian untuk indikator nilai AKIP sebesar **100,12%**.
2. Indikator Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya dan Tangkap) Kab/Kota, target yang ditetapkan 15.446Ton  
Berdasarkan realisasi produksi perikanan Kota Pekalongan yang terdiri dari Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya sebesar 12.142,75 Ton. Sehingga capaian untuk indikator Jumlah produksi perikanan sebesar **78,61%**.

Kinerja keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan Tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar **Rp.7.472.677.614,00**. atau **84,63%** dari total pagu anggaran sebesar **Rp.8.830.250.000,00**.

## **Kendala yang dihadapi :**

1. Target yang ditetapkan terlalu tinggi dengan kondisi produksi perikanan di Kota Pekalongan yang memiliki kecenderungan penurunan, khususnya Perikanan Tangkap yang disebabkan oleh:

- a. Penerapan perundangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sehingga nelayan lebih memilih pelabuhan yg harga acuan ikan yang lebih rendah,
- b. Wilayah penangkapan yang berubah bergeser ke timur sehingga banyak kapal yang tidak melelang ke TPI Kota Pekalongan
- c. Belum ditetapkannya Peraturan Wali Kota Pekalongan yang mengatur tentang pengelolaan TPI dan retribusi TPI

**Langkah kedepan :**

1. Memperhatikan realisasi capaian tahunan dengan target yang telah ditentukan, apabila realisasi selalu dibawah target yang telah ditetapkan dapat segera mengusulkan perubahan target dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bapperida dan Inspektorat. Hal ini dikarenakan apabila terdapat target yang tidak tercapai, dapat mempengaruhi capaian target nilai SAKIP.
2. Mengajukan usulan revisi harga acuan ikan Ke Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pekalongan
3. Koordinasi dengan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pekalongan terkait pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
4. Koordinasi dengan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pekalongan terkait Implementasi Harga Acuan Ikan sepantura Jawa
5. Koordinasi dengan pemilik kapal agar tetap mendaratkan ikannya di TPI Kota Pekalongan
6. Berkoordinasi dengan bagian Hukum Kota Pekalongan terkait isi dan redaksi perwal
7. Merevisi redaksi Peraturan Wali Kota Pekalongan yang mengatur tentang pengelolaan TPI dan retribusi TPI sesuai masukan dari bagian Hukum Setda Kota Pekalongan.
8. Mengupayakan agar Peraturan Wali Kota Pekalongan yang mengatur tentang pengelolaan TPI dan retribusi TPI segera diundangkan

Capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1    LATAR BELAKANG .....	1
1.2    GAMBARAN UMUM ORGANISASI .....	2
1.2.1    Gambaran Umum .....	2
1.2.2    Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	2
1.2.3    Struktur Organisasi .....	6
1.3    KONDISI APARATUR .....	8
1.3.1    Sumber Daya Manusia .....	8
1.3.2    Sarana dan Prasarana Pendukung .....	8
1.4    ISU STRATEGIS .....	11
1.4.1    Permasalahan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah .....	11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	13
2.1    RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026 .....	13
2.2    INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026 .....	16
2.3    PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 .....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	20
3.1    PENGUKURAN KINERJA .....	20
3.2    EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA .....	24
3.2.1.    Capaian Indikator Kinerja Utama .....	24
3.2.2.    Capaian Kinerja Tujuan .....	26
3.2.3.    Analisis Capaian Kinerja .....	27
3.3    AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	39
3.3.1    Realisasi Pengadaan Barang /Jasa .....	42
3.3.2    Realisasi Pendapatan .....	43
3.3.3    Hibah ke Masyarakat .....	45

3.3.4	Bantuan Dari Sumber Lain .....	48
3.4	PRESTASI YANG DIRAIH .....	49
3.5	INOVASI.....	49
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>51</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>53</b>
	<b>IKU PERUBAHAN 2021-2026 .....</b>	<b>53</b>
	<b>PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2024.....</b>	<b>54</b>

## DAFTAR TABEL

Table 1. 1	Komposisi Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan Berdasarkan Tngkat Pendidikan dan Gender .....	8
Table 1. 2	Komposisi Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan Berdasarkan Golongan dan Penempatan.....	8
Table 1. 3	Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Pendukung.....	8
Tabel 2. 1	Matriks Perencanaan Kinerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan Tahun 2025 .....	14
Tabel 2. 2	Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan .....	17
Tabel 2. 3	Target Sasaran Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2026.....	17
Tabel 2. 4	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan .....	18
Tabel 3. 1	Pengukuran dengan Skala Ordinal .....	23
Tabel 3. 2	Pengukuran Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.....	24
Tabel 3. 3	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun tahun sebelumnya.....	24
Tabel 3. 4	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra 2026 .....	25
Tabel 3. 5	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Provinsi/Nasional/Internasional .....	25
Tabel 3. 6	Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.....	26
Tabel 3. 7	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1 .....	27
Tabel 3. 8	Rincian Hasil Evaluasi AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 .....	27
Tabel 3. 9	Perbandingan Nilai Evaluasi AKIP dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025.....	28
Tabel 3. 10	Target Realisasi hasil Evaluasi SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan dari Tahun 2017– 2024.....	29
Tabel 3. 11	Program dan Anggaran Pendukung Sasaran 1.....	30

Tabel 3. 12 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2 .....	33
Tabel 3. 13 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di TPI dan Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2017 – 2025 .....	33
Tabel 3. 14 Program dan Anggaran Pendukung Sasaran 2.....	37
Tabel 3. 16 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025 .....	40
Tabel 3. 17 Realisasi Pengadaan Barang Tahun 2025 .....	42
Tabel 3. 18 Realisasi Pendapatan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 .....	44
Tabel 3. 19 Perkembangan PAD Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2024 .....	44
Tabel 3. 20 Bantuan dari Sumber Lain Bidang Kelautan dan Perikanan di Kota Pekalongan .....	48
Tabel 3. 21 Penjelasan Inovasi KAKAP EMAS .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Bagan Organisasi Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Pekalongan .....	7
Gambar 3. 1 Bimbingan Teknis Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN).....	48
Gambar 3. 2 Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya dari Presiden Republik Indonesia .....	49

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu

meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dar korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

## **1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

### **1.2.1 Gambaran Umum**

Berdasarkan Peraturan Walikota 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang kelautan dan perikanan dipimpin oleh Kepala dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Pekalongan melalui Sekretaris Daerah Kota Pekalongan memiliki 1 (satu) sekretariat, 2 (dua) bidang, yaitu Bidang Perikanan Tangkap dan Bidang Perikanan Budidaya serta 2 (dua) Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD).

### **1.2.2 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Walikota 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan meliputi :

### **1.2.2.1 Tugas**

Dalam melaksanakan tugas DKP menyelenggarakan :

- 1) DKP dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- 2) DKP mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kelautan dan perikanan.

### **1.2.2.2 Fungsi**

Dalam melaksanakan fungsi DKP menyelenggarakan :

#### **I. Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:**

- a) perumusan dan penetapan sasaran program bidang kelautan dan perikanan;
- b) perumusan kebijakan bidang kelautan dan perikanan;
- c) pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang perikanan tangkap;
- d) pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang perikanan budidaya;
- e) pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
- f) pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi UPTD;
- g) pengarahan dan pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP);
- h) pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan program dan pelaksanaan kegiatan; dan
- i) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **II. Sekretariat menyelenggarakan fungsi:**

- a) perumusan sasaran, program dan kegiatan dinas;

- b) pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis dinas;
- c) pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang;
- d) pengoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi capaian kinerja, sasaran, program dan kegiatan;
- e) pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
- f) pengoordinasian pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan bidang keuangan;
- g) pengoordinasian pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan bidang kepegawaian;
- h) pengoordinasian pengelolaan data dan informasi;
- i) pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- j) pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
- k) pengoordinasian pelaporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB);
- l) pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- m) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **III. Bidang Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:**

- a) perumusan program kerja bidang perikanan tangkap;
- b) perumusan bahan kebijakan bidang perikanan tangkap;
- c) pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang perikanan tangkap;
- d) penyelenggaraan pengelolaan penangkapan ikan;
- e) penyelenggaraan pemberdayaan nelayan kecil;
- f) penyelenggaraan penerbitan tanda daftar kapal penangkapan ikan  $\leq 10$  GT;

- g) penyelenggaraan penerbitan izin pengadaan kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan  $\leq 10$  GT;
- h) penyelenggaraan layanan pendaftaran kapal penangkapan ikan  $\leq 10$  GT;
- i) penyelenggaraan pengawasan sumber daya perikanan;
- j) pengoordinasian pengelolaan wilayah pesisir dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- k) perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang perikanan tangkap;
- l) pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- m) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### **IV. Bidang Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi:**

- a) perumusan program kerja bidang perikanan budidaya;
- b) perumusan bahan kebijakan bidang perikanan budidaya;
- c) pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang perikanan budidaya;
- d) penyelenggaraan rekomendasi penerbitan izin usaha budidaya perikanan;
- e) penyelenggaraan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil;
- f) penyelenggaraan penerbitan Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK);
- g) pengoordinasian pengelolaan budidaya perikanan;
- h) penyelenggaraan penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan budidaya;
- i) penyelenggaraan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan ikan budidaya;
- j) pengoordinasian penyediaan dan penyaluran bahan baku industry pengolahan ikan;
- k) perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang

perikanan budidaya;

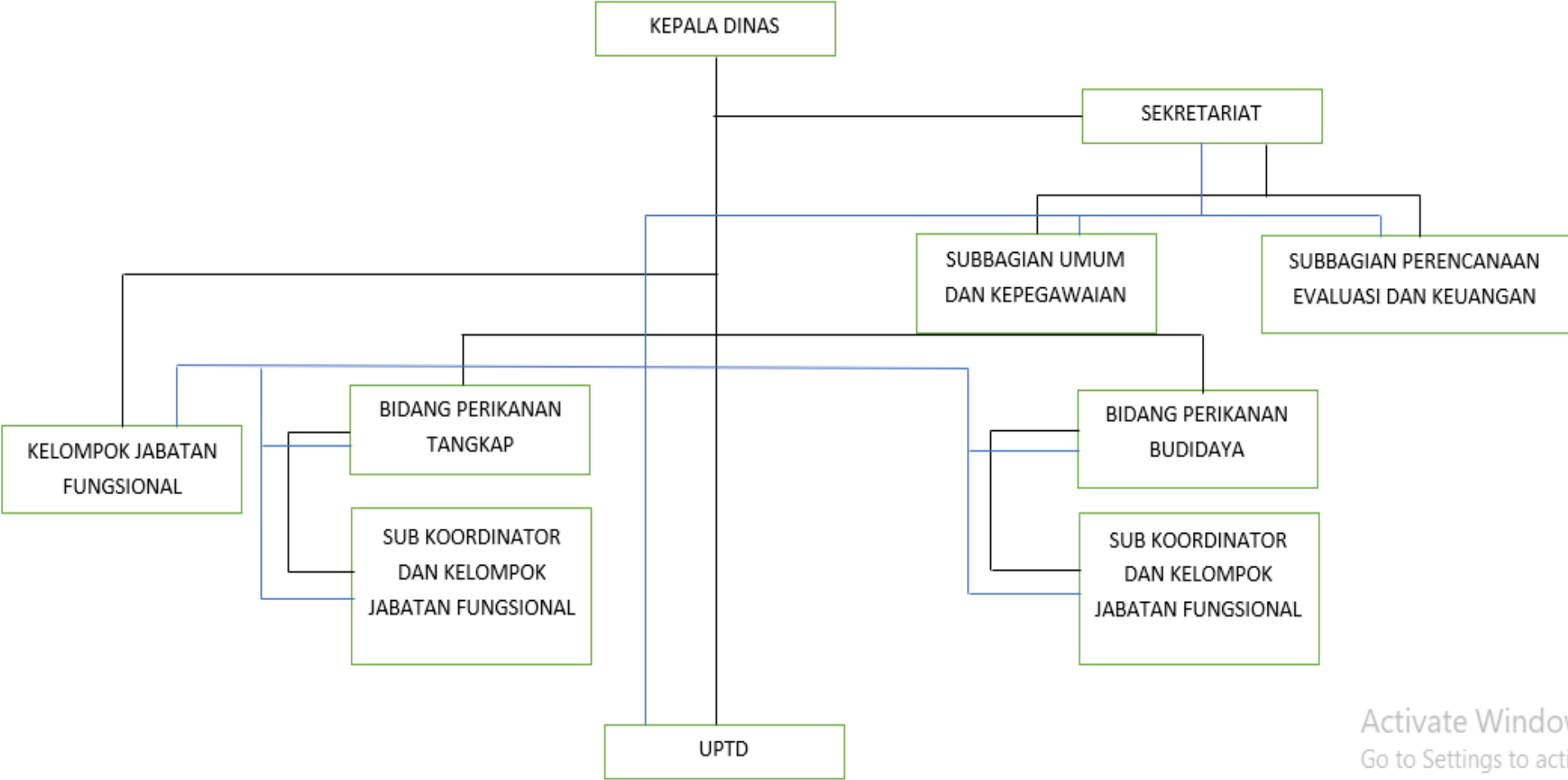
- l) pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### **1.2.3 Struktur Organisasi**

Struktur organisai Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan, sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
  2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perikanan Tangkap;
- d. Bidang Perikanan Budidaya;
- e. UPTD; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1. 1  
Bagan Organisasi Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Pekalongan



Activate Window  
Go to Settings to activ

### 1.3 KONDISI APARATUR

Sumber Daya Manusia Dinas Kelautan dan Perikanan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

#### 1.3.1 Sumber Daya Manusia

Table 1. 1  
Komposisi Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan  
Berdasarkan Tngkat Pendidikan dan Gender

NO	BIDANG	Tingkat Pendidikan								Gender		TOTAL (ORANG)
		SD	SMP	SLTA	D2	D3	S-1	S-2	S-3	L	P	
1	Sekretariat	1	3	8	-	1	9	3	-	16	9	25
2	Bidang Perikanan Tangkap	-	-	1	-	-	5	-	-	4	2	6
3	Bidang Perikanan Budidaya	-	1	-	-	1	4	1	-	5	2	7
4	UPTD TPI	-	1	15	-	3	10	1	-	27	3	30
5	UPTD Technopark	-	1	2	1	1	6	-	-	8	3	11
<b>T O T A L</b>		<b>1</b>	<b>6</b>	<b>26</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>34</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>60</b>	<b>19</b>	<b>79</b>

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian, 31 Desember 2025

Table 1. 2  
Komposisi Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan  
Berdasarkan Golongan dan Penempatan

NO	BIDANG	GOLONGAN (ORANG)						NON ASN	TOTAL (ORANG)
		II	III	IV	PPPK	PPPK Paruh Waktu			
1	Sekretariat	3	5	2	1	10	4	25	
2	Bidang Perikanan Tangkap	-	3	-	-	2	1	6	
3	Bidang Perikanan Budidaya	1	2	1	-	3	-	7	
4	UPTD TPI	-	2	-	-	25	3	30	
5	UPTD Technopark	-	2	1	-	8	-	11	
<b>T O T A L</b>		<b>4</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>48</b>	<b>8</b>	<b>79</b>	

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian, 31 Desember 2025

#### 1.3.2 Sarana dan Prasarana Pendukung

Guna mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut

Table 1. 3  
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Pendukung

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah	Kondisi	Ket
1	Meja Kursi Sofa	376	Baik	
2	Cooler	64	Baik	Coldstorage
3	Lemari/Filing cabinet	61	Baik	

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah	Kondisi	Ket
4	Kasur	60	Baik	Rumah Andon
5	Laptop / PC / Notebook / Komputer	51	Baik; 3 unit Rusak Ringan	
6	Gerobak Tarik/Dorong	47	Baik	
7	AC /Exhause Fan	38	34 unit Baik; 2 unit Rusak Ringan	
8	Handycam/Camera/CCTV	33	Baik	
9	Printer	33	Baik	
10	Timbangan	24	Baik	
11	Alat-alat Peternakan Lain-lain	20	Baik	
12	Freezer	19	Baik	Rumah Kemas
13	Sepeda Motor	19	Baik	
14	Loadspeaker	15	Baik	
15	Dispenser	13	Baik	
16	Mesin Hitung/Jumlah Lain-lain	10	Baik	
17	ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)	9	Baik	
18	Kipas angin	9	Baik	Rumah Andon
19	Hard Disk	9	Baik	
20	Alat Laboratorium Pertanian Lain-lain	7	Baik	Twin Screw Extruder, Mixer, Scew Conveyor, Shifter, Panel, Bahan Trail
21	Pompa Air	7	Baik	
22	Microphone	7	Baik	
23	Pompa Airasil	6	Baik	
24	Refractometer	5	Baik	
25	Rak	5	Baik	
26	Power Amplifier	5	Baik	
27	Proyektor + Attachment	5	Baik	
28	Kendaraan Bermotor Angkutan Brg Lain-lain /Station Wagon	4	Baik	
29	PH Meter	4	Baik	
30	Sound System	4	Baik	
31	Tangga	4	Baik	
32	Alat Laboratorium Hidro Kimia Lain-Lain	3	Baik	
33	DO Meter (Alat Laboratorium Kualitas Air	3	Baik	
34	Alat Rumah Tangga Lain-lain	3	Baik	

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah	Kondisi	Ket
35	Mesin Pemotong Rumput	3	Baik	
36	Mesin Kas Register	3	Baik	
37	Alat Produksi Perikanan Lain-lain	3	Baik	Rak Coldstorage
38	Televisi	3	Baik	
39	Soil PH Meter	3	Baik	
40	Tester Kit	3	Baik	
41	Scaffolding Set & Tool	3	Baik	
42	Alat Dapur Lainnya	2	Baik	Kompur gas dan rak piring
43	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	2	Baik	Alat Semprot lantai TPI
44	Mesin Absensi	2	Baik	
45	Lori Dorong	2	Baik	
46	Wireless	2	Baik	
47	Alat Pembuat Pelet	1	Baik	
48	Antene SHF Stationary	1	Baik	
49	Telephone (PABX)	1	Baik	
50	Papan Pengumuman	1	Baik	
51	Monitor CCTV	1	Baik	
52	Thermometer 0.0 - 100.0 C	1	Baik	
53	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	Baik	
54	Microscope	1	Baik	
55	Tabung Oksigen	1	Baik	
56	Oxygen Regulator	1	Baik	
57	Unconfinet Soil Test	1	Baik	
58	Vacum Coating	1	Baik	
59	Off Air TV Monitor	1	Baik	
60	Facsimile	1	Baik	
61	Handphone	1	Baik	
62	Crawler Excavator + Attachment	1	Baik	
63	Electric Generating Set Lain-lain	1	Baik	
64	Dongkrak Hidrolik	1	Baik	
65	Kardex Besi	1	Baik	
66	White Board	1	Baik	
67	Tabung Gas	1	Baik	
68	Wireless	1	Baik	
69	Tiang Bendera	1	Baik	
70	Compact Disc Player	1	Baik	
71	Battery Charge	1	Baik	

## 1.4 ISU STRATEGIS

Kota Pekalongan merupakan kawasan pesisir utara Pulau Jawa merupakan salah satu simpul strategis jalur Jakarta Surabaya. Industri Perikanan menjadi salah satu bagian Kota Pekalongan. Pelabuhan Pekalongan memiliki peran yang penting di pantura yang tercermin dalam perikanan tangkap tetapi juga menumbuhkan industri perikanan budidaya.

### 1.4.1 Permasalahan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah

#### 1.4.1.1 Permasalahan

##### A. Bidang Perikanan Tangkap

1. terjadinya sedimentasi di Muara Kali Loji yang menyebabkan pendangkalan alur pelabuhan, sehingga menghambat akses keluar masuk kapal dan menuntut adanya bantuan kapal tonda untuk melakukan manuver di kawasan pelabuhan.
2. Terjadinya overfishing di Laut Jawa yang berpengaruh pada fishing ground yang semakin jauh
3. Pembangunan tanggul dan parapet untuk penanganan banjir dan rob, berdampak pada kesulitan dalam menurunkan ikan dari kapal ke lantai lelang TPI.
4. Ditutupnya docking kapal menyebabkan berkurangnya minat kapal berlabuh di TPI Kota Pekalongan.
5. Adanya kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dimana kapal penangkap ikan wajib mendaratkan hasil tangkapannya di pelabuhan pangkalan yang telah ditentukan di dalam Zona Penangkapan Ikan Terukur (ZPIT), bukan hanya pendaratan sembarangan di wilayah penangkapan
6. Adanya kebijakan PNBP pasca produksi yang dapat mempengaruhi acuan harga ikan atau membebani nelayan kecil apabila harga ikan rendah (di bawah harga acuan).

##### B. Bidang Perikanan Budidaya

1. Lahan tambak yang posisinya di luar tanggul, genangannya semakin tinggi sehingga sebagian besar tambak udang tidak operasional dan menjadi lahan tergenang permanen.
2. Meningkatnya serangan hama penyakit pada udang vaname

3. Menurunnya kualitas air dan lingkungan budidaya

#### 1.4.1.2 Peluang

##### A. Bidang Perikanan Tangkap

1. Kota Pekalongan posisi yang strategis yaitu jalur Pantura
2. Memiliki fasilitas strategis skala nasional, yaitu PPN Pekalongan dan TPI
3. Program Nasional Kampung Nelayan/Budidaya Merah Putih di Krpyak
4. Realisasi Pembangunan Pelabuhan Onshore
5. Komoditas unggulan pada sektor perikanan adalah ikan pelagis kecil (layang, banyar, lemuru, dll).
6. Adanya fasilitas coldstorage dan wisma andon (penginapan nelayan).
7. Adanya lokasi pemanfaatan ruang laut untuk rumah ikan.

##### B. Bidang Perikanan Budidaya

1. Memiliki Technopark Perikanan sebagai inkubasi bisnis bidang kelautan dan perikanan (Hilirisasi Industri Perikanan).
2. Industri Pengolahan Perikanan Kota Pekalongan dari skala kecil, menengah dan besar.
3. Memiliki Balai Benih Ikan (BBI) yang menyediakan benih Nila Salin untuk pemanfaatan lahan tergenang dan pembangunan perikanan budidaya
4. Program Nasional Kampung Nelayan/Budidaya Merah Putih di Krpyak
5. Adanya KPB (Kampung Perikanan Budidaya) Tahun 2023
6. Adanya program revitalisasi tambak pantura dari Kementerian Kelautan dan Perikanan
7. Adanya Unit Pengolahan Ikan Nilai Tambah Hidrolisat Protein Ikan (NT HPI) sebagai satu – satunya yang telah di bangun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan

Isu strategis perikanan yang ada di Kota Pekalongan antara lain:

- a. Adanya trend penurunan produksi perikanan tangkap di Kota Pekalongan
- b. Penurunan produksi perikanan budidaya di Kota Pekalongan
- c. Optimalisasi pengelolaan Unit Pengolahan Ikan Nilai Tambah Hidrolisat Protein Ikan (NT HPI)

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026**

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Penyusunan LKjIP Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dan dokumen Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu strategis, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Perubahan atas RPJMD bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan isu strategis dan sebagai tindak lanjut atas evaluasi kegiatan serta kebijakan yang dijalankan.

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan yang ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Program Perangkat Daerah merupakan program-program pada RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021-2026 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Kegiatan dan sub kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya, baik berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dan anggaran sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih untuk setiap program diupayakan dapat menunjukkan akuntabilitas karena merupakan turunan/ *deployment* /cascading dari program serta tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan .

Tabel 2. 1  
Matriks Perencanaan Kinerja pada  
Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan Tahun 2025

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program Kegiatan	Indikator	Target 2025
<b>VISI</b> : Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius		
<b>Misi Ke- 5</b> Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal.		
Tujuan Kota :	-	-
<b>Tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan 1</b> : Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks Masyarakat Kepuasan	81,07
<b>Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan 1</b> : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	83,17

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program Kegiatan	Indikator	Target 2025
<b>Program Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan 1a :</b> Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen
<b>Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan 1a :</b> Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen
<b>Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan 1b :</b> Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen
<b>Program Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan 1b :</b> Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen
<b>Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan 1a :</b> Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen
<b>Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan 1b :</b> Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen
<b>Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan 1c :</b> Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen
<b>Program Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan 1c :</b> Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	
<b>Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan 1 :</b> Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen
<b>Tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan 2 :</b> Meningkatkan produksi perikanan	Pertumbuhan produksi perikanan (tangkap dan budidaya)	1 persen
<b>Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan 2:</b> Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya dan Tangkap) Kab/Kota	15.446 Ton
<b>Program Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan 2a :</b> Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI	1 persen
<b>Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan 1a :</b> Pengelolaan Penangkapan Ikan di	Persentase Sarpras Perikanan Tangkap yang dapat Diusahakan dalam 1	5 persen

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program Kegiatan	Indikator	Target 2025
Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	(satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
<b>Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan 1b :</b> Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Nelayan Kecil yang dibina	10 persen
<b>Program Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan 2b :</b> Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI	1 persen
<b>Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan 1 :</b> Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Peningkatan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Bersumber dari TPI	1 persen
<b>Program Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan 2c :</b> Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1 persen
<b>Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan 1 :</b> Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase ketercapaian aspek-aspek pengelolaan pembudidayaan ikan	100 persen
<b>Program Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan 2d :</b> Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan	12,20 persen
<b>Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan 1 :</b> Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Fasilitasi Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	16,67 persen
<b>Program Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan 2e :</b> Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant)	2 Pelaku usaha
<b>Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan 1 :</b> Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	70 persen

## 2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari serangkaian indikator

kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi dan memberikan informasi mengenai sejauh mana keberhasilan organisasi dalam mencapai target kinerja. Indikator Kinerja Utama yang baik menggambarkan dengan jelas dan terukur hasil kinerja yang diharapkan. Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2. 2  
Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan  
Kota Pekalongan

No	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	Nilai SAKIP Tahun N	Inspektorat
	Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya dan Tangkap) Kab/Kota	Ton	Jumlah total produksi perikanan tangkap dan budidaya (Kab/kota)	Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI dan Produksi perikanan budidaya

Target yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan sebagaimana telah dicantumkan dalam perencanaan strategis dan disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2. 3  
Target Sasaran Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan  
Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	80,00	81,50	83,00	83,07	83,17	83,27
2	Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya dan Tangkap)	Ton	14.843	14.991	15.141	15.293	15.446	15.600

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Kab/Kota							

### 2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada di organisasi.

Tabel 2. 4  
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025  
Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Sasaran Tujuan / Strategis	Indikator	2025		Formulasi
			Satuan	Target	
<b>Tujuan</b>					
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	1 Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,07	Formulasi : IKM Tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Bagian Organisasi
2	Meningkatkan produksi perikanan	1 Pertumbuhan produksi perikanan (tangkap dan budidaya)	persen	1	Formulasi : Jumlah produksi perikanan tahun N - Jumlah produksi perikanan tahun N-1 / Jumlah produksi perikanan tahun N-1 * 100% Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : DKP
<b>Sasaran Strategis</b>					
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1 Nilai SAKIP OPD	Indeks	83,17	Formulasi : Hasil Nilai Evaluasi AKIP OPD Tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Inspektorat

No	Sasaran Tujuan / Strategis	Indikator		2025		Formulasi
				Satuan	Target	
2	Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya dan Tangkap) Kab/Kota	Ton	15.446	Formulasi : Jumlah total produksi perikanan tangkap dan budidaya (Kab/kota) Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : DKP

Program	Anggaran Pergeseran setelah Perubahan	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Rp 5.218.433.000,00	APBD
Program Pengelolaan Tangkap	Rp 3.028.146.000,00	APBD
Program Pengelolaan Budidaya	Rp 220.738.000,00	APBD
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 362.933.000,00	APBD

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Kelautan dan Perikanan selaku pengemban amanah masyarakat Kota Pekalongan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ini didasarkan pada Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2021-2026.

#### **3.1 PENGUKURAN KINERJA**

***Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk :***

- Pembuatan Kebijakan dan Pengawasannya

Meningkatkan perumusan kebijakan dengan menyediakan dasar-dasar yang memadai bagi para pengambil keputusan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai kebutuhan, kinerja pelayanan, dan membuat keputusan realokasi sumber daya jika diperlukan.

- **Arahan Operasional**

Memberikan cara yang lebih sistematis untuk mendeteksi kekuatan/kelemahan operasional untuk melakukan analisa program yang berkelanjutan.
- **Akuntabilitas**

Membantu untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang baik dari pendapatan yang diterima.
- **Perencanaan**

Memfasilitasi perencanaan strategis dan operasional dengan cara menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan sasaran serta merencanakan program-program untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.
- **Pengelolaan**

Memberikan dasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunan efisiensi operasional dan cara untuk memperlihatkan seberapa efisien sumber daya digunakan dalam penyediaan pelayanan dan pencapaian tujuan.
- **Penganggaran**

Memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin membuat keputusan yang objektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya, pengurangan biaya, dan menginvestasikan kelebihan/surplus dana.
- **Penyediaan pelayanan kepada pihak luar**

Membantu terciptanya iklim yang kompetitif dalam penyediaan pelayanan oleh pihak luar dengan cara memberikan data biaya dan kinerja yang didokumentasikan dengan baik serta memonitor kinerja pihak kontraktor berkaitan dengan kualitas pelayanan.
- **Pengawasan Kerja**

Berguna dalam mencapai kinerja pegawai yang lebih baik dengan memberikan dasar yang obyektif bagi penetapan target kinerja dan memberikan masukan dan insentif.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan

dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kota Pekalongan dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

#### **CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

### 3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left( \frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

#### CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 3. 1  
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Data Kelompok".

Penyimpulan capaian sasaran ditetapkan Nilai Mean setiap kategori sebagai berikut :

Sangat Berhasil	:	95
Berhasil	:	82.5
Cukup Berhasil	:	70
Tidak Berhasil	:	57.5
Sangat Tidak Berhasil	:	25

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, tidak berhasil, dan sangat tidak berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja Sasaran} = \frac{\text{Jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{nilai mean}}{\text{jumlah indikator kinerja sasaran}} \times 100\%$$

## CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Adapun untuk penilaian capaian kinerja tujuan untuk setiap indikator tujuan ditetapkan rumus penghitungan dan skala ordinal sesuai Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagaimana penghitungan indikator kinerja utama tersebut di atas.

### 3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

#### 3.2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 2  
Pengukuran Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	83,17	83,27	100,12	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya dan Tangkap) Kab/Kota	Ton	15.446	12.142,75	78,61	Tinggi / Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realisasi tepat dan di atas 100% sebanyak 1 (satu) target;
- 2) Target dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 1 (satu) target;

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar 89,37% dengan kategori Tinggi / Berhasil

Tabel 3. 3  
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun tahun sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja					Ket	
				2021	2022	2023	2024	2025		
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1	Nilai SAKIP OPD	Indeks	80,4	82,15	83,05	83,25	83,17	▲
2	Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan	1	Jumlah Total Produksi Perikanan	Ton	10.536	10.535	10.091,60	12.647,427	12.142,75	▼

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja					Ket
				2021	2022	2023	2024	2025	
	(Tangkap dan Budidaya)	(Budidaya dan Tangkap) Kab/Kota							

Keterangan :

- ▲ = Naik
- = Tetap
- ▼ = Turun

Tabel 3. 4  
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra 2026	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1 Nilai SAKIP OPD	Indeks	83,27	83,27	100	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
2	Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	1 Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya dan Tangkap) Kab/Kota	Ton	12.142,75	15.600	77,84	Tinggi / Berhasil

Tabel 3. 5  
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Provinsi/Nasional/Internasional

No.	Instansi Pemanding	Perbandingan			Ket
		Target Instansi Pemanding	Realisasi DKP Kota Pekalongan	%	
<b>Sasaran 1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Indikator : Nilai SAKIP OPD</b>			
1	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul	84	83,27	99,13	Realisasi nilai SAKIP DKP tahun 2025 dibandingkan target nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul tahun 2025 masih dibawah 100%
2	DKP Provinsi Jawa Timur	94,50		88.12	Realisasi nilai SAKIP DKP tahun 2025 dibandingkan target nilai SAKIP DKP Provinsi Jawa Timur tahun 2025 masih dibawah 100%. Tidak dibandingkan dengan DKP Provinsi Jawa Tengah karena DKP Provinsi Jawa Tengah tidak menggunakan nilai SAKIP sebagai indikator.
3	Kementrian Kelautan pada	85		97,96	Realisasi nilai SAKIP DKP tahun 2025 dibandingkan target nilai SAKIP

No.	Instansi Pemanding	Perbandingan			Ket
		Target Instansi Pemanding	Realisasi DKP Kota Pekalongan	%	
<b>Sasaran 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Indikator : Nilai SAKIP OPD</b>			
	Lingkup KKP				Kementrian Kelautan pada Lingkup KKP tahun 2025 masih dibawah 100%
<b>Sasaran 2 Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)</b>		<b>Indikator : Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya dan Tangkap) Kab/Kota</b>			
1	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul	13.794	12.647,427	91,69	Realisasi produksi perikanan pada DKP Kota Pekalongan dibandingkan dengan target Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul hanya mencapai 91,69%, meski demikian pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul tidak secara langsung menyebut jumlah tersebut akan tetapi diambil pada akumulasi target program Pengelolaan Perikanan Tangkap sebesar 835 ton dan program Pengelolaan Perikanan Budidaya sebesar 12.959 ton.
2.	DKP Provinsi Jawa Tengah	952.718		1,33	Realisasi produksi perikanan pada DKP Kota Pekalongan dibandingkan dengan target DKP Provinsi Jawa Tengah hanya mencapai 1,33%
3	Kementrian Kelautan	24,58 X10 <sup>6</sup>		0,05	Realisasi Produksi perikanan Kota Pekalongan dibandingkan dengan target Kementrian Kelautan hanya mencapai 0,05%

### 3.2.2. Capaian Kinerja Tujuan

Adapun simpulan untuk kategori capaian indikator kinerja tujuan adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 6  
Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,07	81,95	101,09	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
2	Meningkatkan produksi perikanan	Pertumbuhan produksi perikanan (tangkap dan budidaya)	persen	1	-4,78	0	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realisasi tepat dan di atas 100% sebanyak 1 (satu) target yaitu indikator Indeks Kepuasan Masyarakat;
- 2) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 1 (satu) target yaitu Pertumbuhan produksi perikanan (tangkap dan budidaya). Hal ini dikarenakan tidak terjadi kenaikan produksi perikanan akan tetapi terjadi penurunan sehingga angka realisasi adalah negatif.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar 50,55% dengan kategori Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

### 3.2.3. Analisis Capaian Kinerja

#### SASARAN 1 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Capaian indikator sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 7  
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2026	% Renstra 2026
						Target	Realisasi	%		
1	Nilai SAKIP OPD	78,46	Indeks	83,05	83,25	83,17	83,27	100,12	83,27	100

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja Internal Perangkat Daerah Tahun 2025. Hasil evaluasi AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan memperoleh nilai **83,27** atau predikat **“A (MEMUASKAN)”**.

Berikut data rincian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3. 8  
Rincian Hasil Evaluasi AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

No	Komponen / SubKomponen / Kriteria	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	25,2

No	Komponen / SubKomponen / Kriteria	Bobot	Nilai
2	Pengukuran Kinerja	30	24,0
3	Pelaporan Kinerja	15	12,32
4	Evaluasi Akuntabilitas	25	21,75
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>100</b>	<b>83,27</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>A (MEMUASKAN)</b>	

Tabel 3. 9  
Perbandingan Nilai Evaluasi AKIP dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025

No.	OPD	Nilai SAKIP Tahun 2025	Kategori
1	Bapperida	88,7	A
2	DLH	85,95	A
3	Dindagkop-UKM	85,7	A
4	Inspektorat Daerah	84,75	A
5	BPKAD	84,6	A
6	BKPSDM	84	A
7	DPMPPA	83,55	A
8	Dinkominfo	83,5	A
<b>9</b>	<b>DKP</b>	<b>83,27</b>	<b>A</b>
10	Dinkes	83,25	A
11	DPUPR	83,05	A
12	Dindukcapil	82,95	A
13	Setda	81,85	A
14	Dindik	78,5	BB
15	Dinparbudpora	78,15	BB
16	DPMPTSP	78	BB
17	Kec. Selatan	77,15	BB
18	Dinhub	77	BB
19	Kec. Utara	76,65	BB
20	Kec. Barat	76,5	BB
21	Kec. Timur	76,45	BB
22	Dinperpa	76,4	BB
23	Dinsos P2KB	76,35	BB
24	Dinarpus	76,1	BB
25	BPBD	76	BB
26	Satpol P3KP	75,5	BB
27	Dinperinaker	75,45	BB
28	Set DPRD	75	BB
29	Dinperkim	74,8	BB
30	Bakesbangpol	73,75	BB

Sumber : Inspektorat Kota Pekalongan Tahun 2025

Tabel 3. 10  
Target Realisasi hasil Evaluasi SAKIP  
Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan dari Tahun 2017– 2024

Tahun	Target	Nilai	Kategori	Interpretasi	Ket
2017	-	66,49	B	Baik	HASIL EVALUASI APIP TAHUN 2018 ATAS IMPLEMENTASI SAKIP 2017
2018	-	74,98	BB	Sangat Baik	HASIL EVALUASI APIP TAHUN 2019 ATAS IMPLEMENTASI SAKIP 2018
2019	75	75	BB	Sangat Baik	HASIL EVALUASI APIP TAHUN 2020 ATAS IMPLEMENTASI SAKIP 2019
2020	80	78,6	BB	Sangat Baik	HASIL EVALUASI APIP TAHUN 2021 ATAS IMPLEMENTASI SAKIP 2020
2021	82,25	80,42	BB	Memuaskan	HASIL EVALUASI APIP TAHUN 2022 ATAS IMPLEMENTASI SAKIP 2021
2022	81,50	82,15	A	Memuaskan	HASIL EVALUASI APIP TAHUN 2023 ATAS IMPLEMENTASI SAKIP 2022
2023	83,00	83,05	A	Memuaskan	HASIL EVALUASI APIP TAHUN 2024 ATAS IMPLEMENTASI SAKIP 2023
2024	83,07	83,25	A	Memuaskan	HASIL EVALUASI APIP TAHUN 2024 ATAS IMPLEMENTASI SAKIP 2024
2025	83,17	83,27	A	Memuaskan	HASIL EVALUASI APIP TAHUN 2025 ATAS IMPLEMENTASI SAKIP 2025

Sumber : Inspektorat Kota Pekalongan Tahun 2025

Sehingga capaian kinerja sasaran 1 sebesar:

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja Sasaran} &= \frac{\text{Jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{nilai mean}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}} \times 100\% \\ &= \frac{1 \times 95}{1} \times 100\% \\ &= 95\% \end{aligned}$$

Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Dinas Kelautan dan Perikanan sudah menunjukkan hasil yang sangat baik.

**Analisis keberhasilan** capaian kinerja sebagai berikut:

1. Adanya komitmen langsung dari pimpinan instansi (Kepala Daerah/Kepala Dinas) untuk mengawal perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi kinerja.
2. Adanya monitoring, evaluasi, secara konsisten untuk memastikan perbaikan kinerja secara berkesinambungan.
3. Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar stakeholder di bidang perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi;

4. Adanya dukungan yang kuat dari personil yang membidangi perencanaan dan evaluasi pada Perangkat Daerah.
5. Adanya tindak lanjut dari hasil SAKIP tahun sebelumnya.

**Analisis penghambat keberhasilan** capaian kinerja sebagai berikut

1. Adanya capaian kinerja yang tidak mencapai target (sasaran 2: Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)
2. Adanya ketidaksesuaian antara penulisan target pada PK, LKJIP dan dokumen lainnya.
3. Kurangnya Data dukung terkait terkait rekapitulasi perhitungan e-kinerja dan e-presensi yang menjadi dasar penyesuaian tunjangan kinerja/penghasilan
4. Kurangnya kelengkapan narasi pada capaian
5. Belum tersedianya diagram crosscutting
6. Belum tersedianya penugasan untuk Tim Self Assesment pada SK SAKIP

**Upaya Perbaikan kedepan :**

1. Mengajukan revisi target dengan berkoordinasi dengan Bapperida, Inspektorat, dan Bagian Organisasi apabila hasil dari pencermatan dan monitoring rutin masih terdapat target yang telah ditetapkan terlalu tinggi karena faktor eksternal,
2. Melakukan koordinasi dengan Bapperida dan Bagian Organisasi terkait pembuatan *Crosscutting*, Pohon kinerja, dan Cascading
3. Mendorong pemenuhan nilai pada aspek SAKIP yang lainnya.
4. Melakukan verifikasi berjenjang LKJIP dan desk pada bidang/Dinas terkait.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.

Tabel 3. 11  
Program dan Anggaran Pendukung Sasaran 1

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Perencanaan, Penganggaran, dan	24,500,000	20,025,000	19,931,250	- Kegiatan tersebut mendukung Perencanaan yang berkualitas,

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				<p>.penyelarasan Indikator, dan Evaluasi berkala memungkinkan instansi mengenali permasalahan utama dalam pencapaian target dan melakukan perbaikan strategi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumentasi tupoksi, indikator jabatan, dan peta organisasi memudahkan proses pelaporan dan pengukuran kinerja.</li> </ul>
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,645,820,000	3,618,325,000	3,042,838,652	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjamin Kepatuhan terhadap Aturan (Compliance): Administrasi keuangan yang baik memastikan penggunaan anggaran taat pada peraturan perundang-undangan.</li> <li>- Meningkatkan Transparansi dan Pertanggungjawaban: Melalui penatausahaan (pembukuan, inventarisasi, pelaporan) yang tertib, admin keuangan memberikan bukti penggunaan anggaran yang transparan, yang merupakan inti dari akuntabilitas publik.</li> <li>- Mendukung Efektivitas dan Efisiensi Anggaran: Admin keuangan berperan menyelaraskan realisasi belanja dengan target kinerja (output/outcome) yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.</li> <li>- Menyediakan Data untuk Evaluasi Kinerja: Dokumen administrasi keuangan yang disusun sesuai ketentuan (seperti Laporan Keuangan SKPD)</li> <li>- Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan (LKPD): Pengelolaan keuangan yang tertib menghasilkan LKPD yang berkualitas.</li> </ul>
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5,000,000	0	0	- -
Administrasi Umum Perangkat Daerah	383,080,000	256,028,000	255,586,598	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjamin kebutuhan sarana / peralatan kantor untuk memfasilitasi kinerja.</li> <li>- Memfasilitasi pengelolaan rapat kerja dan kehumasan, membantu efisiensi penggunaan</li> </ul>

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
				anggaran dan SDM
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	561,168,000	723,268,000	666,613,751	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peran utama kegiatan ini adalah sebagai enabler (pengaktif). Jika penyediaan jasa penunjang (listrik, air, jasa admin) tidak memadai, maka operasional terganggu, target kinerja gagal tercapai</li> <li>- Melalui manajemen surat-menyurat dan pengelolaan aset, sub kegiatan ini memastikan data dukung (evidence) kinerja terkumpul dengan rapi, akurat, dan berkelanjutan.</li> </ul>
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	839,298,000	600,787,000	596,250,750	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terjaganya sarana prasarana perkantoran (mesin, gedung, kendaraan) membuat pelayanan publik tidak terhambat</li> </ul>

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.

Program	Efisiensi Anggaran	Eisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota.	Anggaran: Rp.5.218.433.000  Realisasi Anggaran: Rp.4.581.221.001 (87,79%)  Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 12,21% yang berasal dari: a) Alokasi anggaran gaji tersusun akres 5% dari tabel anggaran gaji b) Realisasi insentif retribusi daerah hanya sebesar 75% c) Terdapat beberapa pegawai di DKP yang mutasi, promosi, dan pensiun" d) Telah dialokasikan untuk operasional UPI HPI namun sampai dengan akhir desember UPI HPI belum bisa beroperasi karena peralatan & sarpras belum bisa beroperasi secara optimal	Optimalisasi tenaga pelaksana dengan memanfaatkan tenaga PPPK Paruh Waktu dan, Tenaga Kegiatan yang ada.	Efisiensi waktu dalam pelaksanaan rapat internal digunakan untuk membahas beberapa hal yang masih berkaitan

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh

Penghematan anggaran 12,21%, Efisiensi SDM dan waktu

**SASARAN 2 : Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)**

Capaian indikator sasaran Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 12  
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2026	% Renstra 2026
						Target	Realisasi	%		
2.	Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya dan Tangkap) Kab/Kota	13.888	Ton	10.091,60	12.647,427	15,446.00	12,142.75	78,61	15.600	77,84

Berdasarkan hasil produksi perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan pada 2025 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun sebelumnya. Hal ini didukung adanya.

Sehingga capaian kinerja sasaran 2 sebesar:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Kinerja Sasaran} &= \frac{\text{Jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{nilai mean}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}} \times 100\% \\
 &= \frac{1 \times 82,5}{1} \times 100\% \\
 &= 82,5\%
 \end{aligned}$$

Tabel 3. 13  
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di TPI dan Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2017 – 2025

TAHUN	PRODUKSI PERIKANAN (TON)		JUMLAH TOTAL
	TANGKAP	BUDIDAYA	
2017	10.474,51	1.625	12.100,00
2018	10.980,03	1.745	12.725,00
2019	14.991,86	1.757	16.749,00
2020	13.887,55	809,032	14.696,58
2021	8.936,92	612,66	9.549,58
2022	10.032,59	502,46	10.535,05
2023	9.613,34	540,30	10.153,64
2024	12.151,22	521,82	12.673,04

TAHUN	PRODUKSI PERIKANAN (TON)		JUMLAH TOTAL
	TANGKAP	BUDIDAYA	
2025	11.514,55	628,20	12.142,75

**Analisis penghambat keberhasilan** capaian kinerja sebagai berikut

Kondisi tersebut terjadi karena nelayan cenderung enggan melakukan labuh dan mengikuti proses pelelangan di TPI Kota Pekalongan, yang disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

**1. Penerapan aturan terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sehingga nelayan lebih memilih pelabuhan yang harga acuan ikan lebih rendah.**

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada sektor perikanan tangkap merupakan pungutan yang dikenakan atas pemanfaatan sumber daya perikanan, yang dihitung berdasarkan harga acuan ikan dan volume hasil tangkapan yang didaratkan di pelabuhan perikanan. Penerapan ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya perikanan serta kontribusi sektor perikanan terhadap penerimaan negara.

Dalam implementasinya, perbedaan harga acuan ikan yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) antar pelabuhan perikanan memengaruhi pertimbangan ekonomi nelayan, khususnya terkait efisiensi biaya operasional. Harga acuan ikan yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) memiliki pengaruh langsung terhadap besaran pungutan yang harus dibayarkan nelayan pada saat pendaratan hasil tangkapan. Semakin tinggi harga acuan ikan yang ditetapkan pada suatu pelabuhan perikanan, semakin besar pula nilai PNBP yang dikenakan, terlepas dari fluktuasi harga jual riil di tingkat nelayan. Kondisi tersebut mendorong sebagian nelayan untuk memilih pelabuhan dengan harga acuan yang lebih rendah sebagai lokasi pendaratan hasil tangkapan.

Dalam kondisi tersebut, nelayan cenderung mempertimbangkan efisiensi biaya operasional secara menyeluruh, termasuk biaya bahan bakar, perbekalan, bongkar muat, serta pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Perbedaan harga acuan ikan antar pelabuhan menyebabkan adanya variasi besaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus dibayarkan untuk jenis dan volume tangkapan yang sama. Pelabuhan dengan harga acuan lebih rendah dinilai memberikan beban biaya yang lebih ringan, sehingga menjadi pilihan yang lebih rasional secara ekonomi bagi nelayan.

Pertimbangan tersebut mendorong nelayan untuk mengalihkan lokasi pendaratan hasil tangkapan ke pelabuhan yang menerapkan harga acuan ikan lebih rendah, meskipun secara geografis tidak selalu merupakan pelabuhan terdekat dengan daerah penangkapan.

## **2. Wilayah penangkapan yang berubah bergeser ke timur sehingga banyak kapal yang tidak melakukan lelang ke TPI Kota Pekalongan.**

Wilayah penangkapan ikan memiliki keterkaitan erat dengan lokasi pendaratan dan pelaksanaan lelang ikan, karena keduanya dipengaruhi oleh pertimbangan teknis, ekonomis, dan administratif nelayan. Perubahan wilayah penangkapan, baik yang disebabkan oleh faktor musim, ketersediaan sumber daya ikan, kebijakan pengelolaan perikanan, maupun kondisi cuaca, akan memengaruhi pola operasional kapal perikanan.

Secara teknis, wilayah penangkapan yang bergeser dapat mengubah jarak tempuh kapal menuju pelabuhan pendaratan. Nelayan cenderung memilih pelabuhan yang paling efisien dari wilayah penangkapan terbaru, baik dari sisi jarak, waktu tempuh, maupun biaya bahan bakar. Akibatnya, ikan hasil tangkapan tidak selalu didaratkan di pelabuhan asal atau wilayah administratif yang sama dengan sebelumnya.

Dari sisi ekonomi, lokasi pendaratan ikan berpengaruh langsung terhadap mekanisme pelelangan ikan, termasuk harga jual, biaya bongkar muat, retribusi, dan pungutan lain yang berlaku. Perubahan wilayah penangkapan sering kali mendorong nelayan memilih tempat pendaratan dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dianggap lebih menguntungkan atau lebih efisien secara biaya, meskipun berada di luar wilayah administrasi daerah asal nelayan.

Selain itu, secara administratif, pendaratan ikan menjadi dasar pencatatan produksi perikanan tangkap, sehingga perubahan wilayah penangkapan yang diikuti dengan pergeseran lokasi pendaratan akan berdampak pada distribusi

data produksi antar pelabuhan dan antar daerah.

**3. Peraturan Wali Kota Pekalongan yang mengatur tentang pengelolaan TPI dan retribusi TPI belum ditetapkan.**

**Analisis keberhasilan** capaian kinerja sebagai berikut:

1. Adanya dukungan yang kuat dari personil yang membidangi Perikanan tangkap dan budidaya.
2. Adanya penerapan SOP budidaya (Cara Budidaya Ikan yang Baik/CBIB) semakin baik sehingga meminimalisir kejadian penyakit dan kontribusi dari produksi budidaya rumput laut yang mulai dikembangkan tahun 2025.
3. Kegiatan budidaya rumput laut berproduksi setelah sebelumnya tidak optimal, sehingga turut mendorong peningkatan total produksi perikanan khususnya perikanan budidaya.

**Upaya Perbaikan kedepan :**

1. Mengajukan usulan revisi harga acuan ikan Ke Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pekalongan
2. Koordinasi dengan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pekalongan terkait pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
3. Koordinasi dengan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pekalongan terkait Implementasi Harga Acuan Ikan sepanjang Jawa
4. Koordinasi dengan pemilik kapal agar tetap mendaratkan ikannya di TPI Kota Pekalongan
5. Berkoordinasi dengan bagian Hukum Kota Pekalongan terkait isi dan redaksi perwal
6. Merevisi redaksi Peraturan Wali Kota Pekalongan yang mengatur tentang pengelolaan TPI dan retribusi TPI sesuai masukan dari bagian Hukum Setda Kota Pekalongan.
7. Mengupayakan agar Peraturan Wali Kota Pekalongan yang mengatur tentang pengelolaan TPI dan retribusi TPI segera diundangkan

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.

2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Tabel 3. 14  
Program dan Anggaran Pendukung Sasaran 2

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
<b>1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>				
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	117,454,000	40,551,000	40,507,576	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumentasi tupoksi, yang menghasilkan dokumen statistik produksi perikanan tangkap</li> <li>- Data tersebut dapat digunakan sebagai Dasar Kebijakan dan Sarana Prasarana: Data yang dikumpulkan menjadi bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam menetapkan kebijakan perikanan, serta perencanaan sarana prasarana yang tepat (seperti alat tangkap atau pelabuhan perikanan).</li> </ul>
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	67,740,000	63,290,000	62,835,152	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan / pembinaan membantu nelayan menguasai teknologi penangkapan ikan modern dan ramah lingkungan, sehingga hasil tangkapan meningkat.</li> <li>- Membantu pemantauan manajemen Kelompok nelayan yang aktif dan terstruktur memungkinkan efisiensi operasional dan perwujudan kemandirian dalam pengelolaan perikanan, sehingga produksi lebih berkelanjutan</li> </ul>
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	3,134,773,000	3,134,773,000	2,261,543,909	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Operasional pelaksanaan Lelang TPI yang meliputi sewa TPI, dan tenaga pelaksana Lelang dan rapat koordinasi yang berkaitan dengan Lelang.</li> </ul>
<b>2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>				
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	287,188,000	220,738,000	163,881,190	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Target produksi budidaya tercapai karena penerapan SOP budidaya (Cara Budidaya Ikan yang Baik/CBIB) semakin baik sehingga meminimalisir kejadian penyakit dan kontribusi dari produksi budidaya rumput laut yang mulai dikembangkan tahun 2025.</li> </ul>
<b>3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>				
Pembinaan Mutu dan	36,740,000	600,000	600,000	- Dilakukannya Pembinaan

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
<b>1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>				
Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				kepada pelaku usaha pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan baik secara luring maupun daring dengan berkoordinasi dengan DKP Provinsi Jateng dan KKP.
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	385,198,000	362,333,000	362,088,786	- Dilakukannya Pembinaan dan pelatihan kepada pelaku usaha pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan baik secara luring maupun daring dengan berkoordinasi dengan DKP Provinsi Jateng dan KKP.

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada dimaksud:

Program	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	<p>Anggaran: Rp.3.028.146.000</p> <p>Realisasi Rp.2.364.886.637 Anggaran: (78.10%)</p> <p>Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 21.90% yang berasal dari:</p> <p>a) Biaya sewa TPI turun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya berdasarkan MOU baru Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Perum Perindo mengenai sewa TPI</p> <p>b) Tidak terlaksananya proses pengadaan barang berupa kapal pemadam disebabkan oleh wanprestasi penyedia barang yang tidak memenuhi kewajiban penyerahan barang sesuai tenggang waktu dalam surat pesanan, sehingga serah terima barang tidak dapat dilaksanakan</p>	<p>optimalisasi tenaga pelaksana dengan memanfaatkan tenaga PPPK Paruh Waktu, Tenaga Kegiatan dan Penyuluh Perikanan yang ada.</p>	<p>Efisiensi waktu pada Pengelolaan Perikanan Tangkap dalam mendukung pencapaian sasaran meningkatnya nilai produksi perikanan (tangkap dan budidaya) mekanisme lelang one day service, sehingga menarik minat nelayan untuk lelang di TPI Kota Pekalongan</p>
Program	Anggaran: Rp.220.738.000	a) Melibatkan tenaga	Efisiensi kegiatan distribusi

Program	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Pengelolaan Perikanan Budidaya	<p>Realisasi Anggaran: Rp.163.881.190 (74.24%)</p> <p>Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 25.76% yang berasal dari: Pemberian hibah yang tidak terealisasi dengan pertimbangan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a) Penyesuaian prioritas kebutuhan masyarakat di wilayah dapil</p> <p>b) Pertimbangan teknis dan administratif yang tidak memungkinkan hibah dilanjutkan pada tahun anggaran berjalan</p> <p>c) Faktor lain yang bersifat mendesak dan perlu penyesuaian kebijakan</p>	<p>PPPK Paruh Waktu dan Penyuluh Perikanan dalam kegiatan survei lokasi, penyiapan benih, monitoring dan pembinaan.</p> <p>b) Efisiensi kegiatan distribusi benih (penerima benih ambil benih sendiri) sehingga menghemat tenaga distribusi</p>	<p>benih (penerima benih ambil sendiri) sehingga penyiapan benih dan distribusi lebih cepat</p>
Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	<p>Anggaran: Rp.362.933.000</p> <p>Realisasi Anggaran: Rp.362.688.786 (99.93%)</p> <p>Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 0.07% yang berasal dari:</p>	<p>a) Optimalisasi tenaga pelaksana dengan memanfaatkan tenaga PPPK Paruh Waktu dan Penyuluh Perikanan dalam kegiatan pembinaan dan pelatihan</p> <p>b) Koordinasi dengan DKP Provinsi Jateng dan KKP dalam kegiatan pembinaan dan pelatihan secara daring</p>	<p>Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pelatihan secara daring dengan DKP Provinsi Jateng dan KKP sehingga menghemat waktu dan biaya</p>

### 3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengukuran akuntabilitas, selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran, akuntabilitas juga dilihat dari realisasi anggaran, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP). Selama tahun 2025 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Kelautan dan Perikanan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan. Pagu total belanja

Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 adalah sebesar Rp.8.830.250.000,- dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp.7.472.677.614,- atau sebesar 84,63%. Sedangkan pagu belanja non gaji dan tunjangan sebesar Rp.5.367.585.000,- dengan realisasi sebesar Rp.4.538.168.862,- atau sebesar 84,55%. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 15  
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025

NO	JENIS BELANJA	TARGET 2025	REALISASI 2025	%
3.25	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>8.830.250.000</b>	<b>7.472.677.614</b>	<b>84,63</b>
3.25.0.00.0.00.01.0000	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>8.830.250.000</b>	<b>7.472.677.614</b>	<b>84,63</b>
<b>3.25.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.218.433.000</b>	<b>4.581.221.001</b>	<b>87,79</b>
<b>3.25.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>20.025.000</b>	<b>19.931.250</b>	<b>99,53</b>
3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.625.000	6.620.250	99,93
3.25.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.450.000	1.370.000	94,48
3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.950.000	11.941.000	99,92
<b>3.25.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.618.325.000</b>	<b>3.042.838.652</b>	<b>84,10</b>
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.567.465.000	2.992.584.652	83,89
3.25.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	49.410.000	48.810.000	98,79
3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.450.000	1.444.000	99,59
<b>3.25.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.25.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00
<b>3.25.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>256.028.000</b>	<b>255.586.598</b>	<b>99,83</b>
3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.670.000	7.670.000	100,00
3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88.958.000	88.582.714	99,58
3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.750.000	4.745.650	99,91
3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	67.760.000	67.748.000	99,98
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.570.000	6.568.000	99,97
3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.830.000	1.830.000	100,00
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78.490.000	78.442.234	99,94

NO	JENIS BELANJA	TARGET 2025	REALISASI 2025	%
<b>3.25.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>723.268.000</b>	<b>666.613.751</b>	<b>92,17</b>
3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.600.000	1.600.000	100,00
3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	361.595.000	305.661.523	84,53
3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	360.073.000	359.352.228	99,80
<b>3.25.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>600.787.000</b>	<b>596.250.750</b>	<b>99,24</b>
3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	128.558.000	124.113.500	96,54
3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	438.354.000	438.312.250	99,99
3.25.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33.875.000	33.825.000	99,85
<b>3.25.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>3.028.146.000</b>	<b>2.364.886.637</b>	<b>78,10</b>
<b>3.25.03.2.01</b>	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>40.551.000</b>	<b>40.507.576</b>	<b>99,89</b>
3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	40.551.000	40.507.576	99,89
3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	0	0	0,00
3.25.03.2.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	0	0	0,00
<b>3.25.03.2.02</b>	<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>63.290.000</b>	<b>62.835.152</b>	<b>99,28</b>
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	30.440.000	30.381.576	99,81
3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	32.850.000	32.453.576	98,79
<b>3.25.03.2.03</b>	<b>Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</b>	<b>2.924.305.000</b>	<b>2.261.543.909</b>	<b>77,34</b>
3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	2.924.305.000	2.261.543.909	77,34
<b>3.25.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>220.738.000</b>	<b>163.881.190</b>	<b>74,24</b>
<b>3.25.04.2.04</b>	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>220.738.000</b>	<b>163.881.190</b>	<b>74,24</b>
3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.620.000	7.220.000	94,75
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	11.660.000	10.799.038	92,62

NO	JENIS BELANJA	TARGET 2025	REALISASI 2025	%
3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.420.000	6.400.000	86,25
3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	186.138.000	131.962.152	70,89
3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	7.900.000	7.500.000	94,94
<b>3.25.06</b>	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>362.933.000</b>	<b>362.688.786</b>	<b>99,93</b>
<b>3.25.06.2.02</b>	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>100,00</b>
3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	600.000	600.000	100,00
3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan Dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	0,00	0,00	0,00
<b>3.25.06.2.03</b>	<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>362.333.000</b>	<b>362.088.786</b>	<b>99,93</b>
3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	362.333.000	362.088.786	99,93

### 3.3.1 Realisasi Pengadaan Barang /Jasa

Tabel 3. 16  
Realisasi Pengadaan Barang Tahun 2025

Nama / Jenis Barang	Merk/ Type/ Spesifikasi	Tanggal	Nomor	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga
Televisi	Polytron 43"	3-Nov-25	000.3.2/0285	1	3.950.000	3.950.000
Mesin Hitung Elektronik / Calculator	Casio FR2650RC	5-Nov-25	000.3.2/0292	2	1.750.000	3.500.000
Gerobak Tarik		4-Nov-25	000.3/0270	1	5.000.000	5.000.000
Sound System	Paspro	1-Dec-25	EP-01KB42V3BH98C6NG CEZEFDTDZW9	1	8.700.000	8.700.000
P.C Unit	Lenovo Intel Core i7 RAM 16 GB SSD 1 TB, Windows 11	10-Dec-25	1096/JT/XII/25	2	6.800.000	13.600.000

Nama / Jenis Barang	Merk/ Type/ Spesifikasi	Tanggal	Nomor	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga
Kursi Rapat	Brother	12-Dec-25	181/INV/OJS/25	10	575.000	5.750.000
Kursi Rapat	Brother	12-Dec-25	181/INV/OJS/25	2	555.000	1.110.000
Timbangan	Gyumo	12-Dec-25	181/INV/OJS/25	1	5.994.000	5.994.000
Laptop	Mybook Pro 107 (855)	25-Jun-25	EP-01JXY1X5Mg88DPJO HC9BAAP9MM	1	14.800.000	14.800.000
Laptop	Acer Travelmate P214 Core-i7 (TMP214/0006)	25-Jun-25	EP-01JXY1X5Mg88DPJO HC9BAAP9MM	1	17.800.000	17.800.000
Alat Pemadam / Portable	Alpindo 9 KG	25-Jun-25	EP-01JXY1X5Mg88DPJO HC9BAAP9MM	1	2.550.000	2.550.000
A.C Split	Panasonic Cu/C5-YN12AKJ 1,5 PK	25-Jun-25	EP-01JXY1X5Mg88DPJO HC9BAAP9MM	1	8.700.000	8.700.000
A.C Split	Panasonic CU/C5-YN9AKJ 1 PK	25-Jun-25	EP-01JXY1X5Mg88DPJO HC9BAAP9MM	1	6.900.000	6.900.000
Kipas Angin	Maspion	9-Dec-25		1	405.000	405.000
Mesin Pemotong Rumput	Pro Tanaka			1	4.300.000	4.300.000
Alat Penghancur Kertas	Aurora	20-Nov-25	000.3.2/dkp/2025	1	1.000.000	1.000.000
Alat Penghancur Kertas	Krisbow	4-Dec-25	000.3.2/dkp1/2025	1	1.250.000	1.250.000
CCTV (Camera Control television System)		04-Jun-25	000.3/0099/2025	1	2.808.500	2.808.500
Televisi	Ploytron 43"			1	3.385.000	3.385.000
Aerator		15-Sep-25	33.75/06.0/000094/TU/3.25.0.00.0.00.01.0000/M/9/2025	1	957.000	957.000
Bracket Standing Peralatan		5-Nov-25	33.75/06.0/001012/UP/3.25.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	1	400.000	400.000
Trolley Car/Lori		4-Nov-25	000.3/0270	2	2.400.000	4.800.000
Rehab Gedung Kantor	Rehab Atap Tecknopark A27	24/12/2025	33.75/04.0/000200/LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/PP R3/12/2025	1	103.202.000	103.202.000
Rehab Gedung Kantor	Rehab Pagar Kantor	24/12/2025	33.75/04.0/000199/LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/PP R3/12/2025	1	78.457.250	78.457.250
Rehab Gedung Kantor	Ruang Tangkap dan Partisi	19/12/2025	33.75/04.0/000196/LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/PP R3/12/2025	1	192.747.000	192.747.000

### 3.3.2 Realisasi Pendapatan

Untuk pendapatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan

diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (Kios pasar ikan & senkul)
2. Retribusi Penyewaan Bangunan (Rumah Pakan)
3. Retribusi Pemakaian Alat (Cold Storage)
4. Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan
5. Pendapatan Denda Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-Pemanfaatan Aset Daerah

Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 disajikan sebagai berikut :

Tabel 3. 17  
Realisasi Pendapatan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

No.	Jenis Pendapatan	Target	Realisasi	%
4	Pendapatan	3.894.800.000	3.416.193.290	87,71
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3.894.800.000	3.416.193.290	87,71
4.1.02	Retribusi Daerah	3.894.800.000	3.415.295.790	87,69
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	3.894.800.000	3.415.295.790	87,69
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	3.848.000.000	3.365.095.790	87,45
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	3.848.000.000	3.365.095.790	87,45
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	46.800.000	50.200.000	107,26
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	46.800.000	50.200.000	107,26
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	897.500	0,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	897.500	0,00
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	0,00	897.500	0,00
4.1.04.13.02.0046	Pendapatan Denda Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-Pemanfaatan Aset Daerah	0,00	897.500	0,00

Realisasi perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kelautan Perikanan Kota Pekalongan selama periode tahun 2017-2025 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 18  
Perkembangan PAD Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2024

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	APBD	Proporsi terhadap APBD (%)
2017	6.000.000.000	4.938.253.020	7.468.706.000	66,12
2018	5.514.800.000	4.800.050.620	4.441.500.000	108,07
2019	6.093.700.000	5.362.751.300	5.208.125.759	102,97
2020	5.096.500.000	5.402.662.710	4.407.663.000	122,57
2021	5.621.000.000	4.437.318.000	9.792.743.000	45,31

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	APBD	Proporsi terhadap APBD (%)
2022	5.719.800.000	4.510.668.430	9.032.219.000	49,94
2023	5.125.200.000	3.864.760.920	9.352.584.000	41,32
2024	5.118.400.000	3.772.123.400	8.979.844.000	42,01
2025	3.894.800.000	3.416.193.290	8,830,250,000	38,69

### 3.3.3 Hibah ke Masyarakat

Program hibah kepada masyarakat dilaksanakan sebagai bentuk fasilitasi pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penyaluran hibah dilakukan kepada kelompok masyarakat yang memenuhi persyaratan administratif dan substantif sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan program hibah memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran program, khususnya dalam mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat, meskipun dampaknya bervariasi antar kelompok penerima sesuai dengan karakteristik dan kapasitas masing-masing. Pelaksanaan Hibah Tahun 2025 berupa **Pemberian Bantuan Benih Udang vaname dan Benih ikan Bandeng kepada Pokdakan Mina Aji Kelurahan Bandengan Pagu Rp.19.000.000,- Realisasi Rp.18.180.000,-**.

Penebaran benih pada 12 juni 2025 berupa 250.000 benih udang vaname, dan 7.000 benih bandeng.

Kegiatan penebaran benih dilakukan pada tanggal 12 Juni 2025 di area tambak tradisional yang berlokasi di Kelurahan Bandengan, setelah seluruh persiapan petak tambak dinyatakan memenuhi standar kelayakan operasi. Penebaran dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan budidaya ikan bandeng dan udang pada musim tanam tahun berjalan.

Sebelum kegiatan penebaran dimulai, tim teknis melakukan pengecekan akhir terhadap kondisi kualitas air meliputi suhu, pH, salinitas, dan kekeruhan. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa kondisi lingkungan berada pada kisaran optimal untuk penebaran benih, dengan suhu 29–31°C, pH 7,5–8,2, dan salinitas 15–25 ppt. Pintu air, saringan, dan pematang juga dipastikan dalam kondisi baik untuk mencegah masuknya hama maupun biota liar.

Pada kegiatan ini, dilakukan penebaran sebanyak 7.000 ekor benih ikan bandeng (*Chanos chanos*) dan 250.000 ekor benih udang (*Litopenaeus vannamei*).

Sebelum ditebar, seluruh benih menjalani proses aklimatisasi dengan penyamaan suhu dan salinitas antara wadah transportasi dan air tambak selama 20–30 menit untuk mengurangi stres serta meningkatkan tingkat kelangsungan hidup.

Gambar 3. 1  
Penebaran benih ikan untuk Pokdakan Mina Aji



Dilakukan pembinaan dan monitoring setelah mendapatkan bantuan pada tanggal 8 September 2025 dan 7 Oktober 2025.

a. Monev tanggal 8 September 2025

Kegiatan monitoring budidaya ikan bandeng dan udang vaname pada tambak tradisional ini dilakukan ketika komoditas telah memasuki usia tebar tiga bulan. Pada fase ini, pertumbuhan kedua komoditas mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan dan membutuhkan pengamatan yang lebih intensif untuk memastikan kondisi lingkungan maupun kesehatan organisme tetap optimal.

Monitoring dimulai dengan melakukan pengecekan visual kondisi permukaan tambak. Warna air diamati untuk memastikan kesesuaian dengan standar kualitas air bagi pertumbuhan bandeng dan vaname. Warna air yang stabil, tidak terlalu gelap maupun terlalu jernih, menandakan keseimbangan plankton yang baik. Selain itu, dilakukan pengukuran parameter kualitas air sederhana seperti ketinggian air, salinitas, dan suhu menggunakan alat ukur manual yang umum dipakai pada tambak tradisional.

Hasil monitoring menunjukkan bahwa budidaya bandeng dan udang vaname di tambak tradisional dapat berkembang dengan baik apabila pengelolaan kualitas air, pemberian pakan, serta pengawasan rutin dilakukan secara konsisten. Dengan kondisi saat ini, kedua komoditas berada pada fase pertumbuhan yang positif dan diperkirakan dapat mencapai ukuran panen sesuai target jika pemeliharaan

dilanjutkan secara optimal.

Gambar 3. 2  
Monev I terhadap Hibah



b. Monev tanggal 7 Oktober 2025

Monitoring dan evaluasi kegiatan budidaya ikan bandeng dan udang pada tambak tradisional dilaksanakan secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pemeliharaan berjalan sesuai standar operasional dan menghasilkan performa produksi yang optimal. Kegiatan monev mencakup pengamatan kualitas air, kondisi pertumbuhan biota, ketersediaan pakan alami, pengendalian hama dan penyakit, serta evaluasi terhadap manajemen pemeliharaan.

Pengukuran kualitas air dilakukan setiap hari meliputi parameter suhu, pH, salinitas, oksigen terlarut (DO), dan ketinggian air. Secara umum parameter berada dalam kisaran ideal, dengan suhu berkisar 28–31°C, pH 7,5–8,3, salinitas 20–28 ppt, dan DO rata-rata 4–6 mg/L. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa ketersediaan pakan alami (plankton) cukup stabil, ditandai dengan warna air hijau kecoklatan dan indeks plankton pada tingkat sedang.

Hasil Panen ( Parsial/ Sebagian):

1. Ikan Bandeng (*Chanos chanos*)

- Jumlah panen : 200 kg
- Ukuran rata-rata : 6 ekor/kg
- Tingkat kelulushidupan (SR) : 60-70 %
- Kondisi ikan : segar, gerakan aktif, warna tubuh cerah

2. Udang (*Vannamei/Tiger/jenis lain – sesuaikan*)

- Jumlah panen : 100 kg
- Ukuran rata-rata (size) : 100 ekor/kg
- Tingkat kelulushidupan (SR) : 60-70%

- Kondisi udang : warna cerah, cangkang keras, tubuh bersih

Gambar 3. 3  
Monev II terhadap Hibah



### 3.3.4 Bantuan Dari Sumber Lain

Masyarakat Kota Pekalongan khususnya yang bermata pencaharian bidang Kelautan dan Perikanan mendapatkan bantuan dari berbagai sumber anggaran, hal ini menjadi salah satu komponen yang cukup penting bagi perkembangan masyarakat yang menerima manfaatnya, antara lain:

Tabel 3. 19  
Bantuan dari Sumber Lain  
Bidang Kelautan dan Perikanan di Kota Pekalongan

No.	Sumber Dana	Penerima	Nilai Bantuan
<b>Bidang Perikanan Tangkap</b>			
1	DKP Provinsi Jateng TA 2025	170 nelayan kecil berupa kartu asuransi nelayan jawa tengah 2025 (berlaku 10 September 2025, 10 September 2026) Premi 100.000/tahun	<b>17.000.000,00</b>
2	DKP Provinsi Jateng TA 2025	Bimbingan Teknis Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN) untuk 30 Nelayan Kota Pekalongan yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Provinsi Jateng oleh DKP Provinsi dengan Instruktur dan Pemateri dari PPN Pekalongan. Kegiatan diawasi oleh pengawas Balai Diklat dan Penyuluhan Perikanan Tegal	-

Gambar 3. 4  
Bimbingan Teknis Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN)



### 3.4 PRESTASI YANG DIRAIH

Dalam kurun pelaksanaan anggaran tahun 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan telah mendapatkan penghargaan / prestasi yang diraih yang pada bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Adapun penghargaan dan prestasi yang diraih antara lain :

1. Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya kepada Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sebagai bentuk penghargaan atas keberhasilan Pemerintah Kota Pekalongan dalam mengembangkan sektor kelautan dan perikanan. Berbagai program inovatif seperti KAKAP EMAS, APUNGKU, dan Technopark Perikanan (Jajan Ikan) dinilai mampu meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat pesisir. Pemerintah Kota Pekalongan kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional., menerima

Gambar 3. 5

Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya dari Presiden Republik Indonesia



### 3.5 INOVASI

Dalam kurun pelaksanaan anggaran hingga tahun 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan telah melaksanakan inovasi dalam rangka mencapai sasaran Peningkatan produksi perikanan berupa inovasi “**FISHOLIK**” yang merupakan singkatan dari (**Fortifikasi Hidrolisat Protein Ikan**).

1. Dasar Hukum Pelaksanaan

Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 59 Tahun 2022 tentang Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan

2. Kondisi Sebelum Inovasi

Sebelum adanya inovasi Fisholik, ikan hanya dikonsumsi secara langsung

(hanya direbus, digoreng atau dibakar) dilakukan pengolahan add value dengan sumber ikan yang di-fillet atau dibuat surimi sehingga memerlukan pemrosesan yang panjang.

### 3. Kondisi Setelah Inovasi

- Ikan diolah menjadi tepung HPI, kemudian tepung HPI dikonsumsi menjadi berbagai masakan.
- Tepung HPI bisa digunakan sebagai bahan tambahan pangan untuk memperkaya kandungan protein pada makanan yang ditambahkan HPI.
- Mengonsumsi tepung HPI sama dengan mengonsumsi ikan karena tepung HPI mengandung protein, omega 3, DHA, kalsium, dan macam-macam antioksidan lainnya.

### 4. Keunggulan / spesifikasi produk

- Belum diproduksi ditempat lain.
- Jenis produk berupa; mie HPI, cookies HPI, dan stik HPI.
- Sudah tidak beraroma ikan.
- Rasanya lebih gurih.
- Kandungan protein yang lebih tinggi.
- Dibuat dengan bahan pewarna alami seperti wortel atau buah naga.
- Tidak mengandung bahan pengawet sehingga produk lebih enak, sehat, bergizi dan aman untuk dikonsumsi.

### 5. Spesifikasi Teknis

Kadar kandungan minimal tepung HPI yang ditambahkan dalam makanan adalah 5% dari bahan komposisi penyusun makanan olahan tersebut. Kadar tersebut dapat berubah pada masing-masing makanan olahan tergantung dengan formulasi rasio komposisi dari makanan olahan yang akan dibuat. Makanan olahan yang ditambahkan tepung HPI akan mengandung protein lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak ditambahkan dengan tepung HPI.

### 6. Hasil inovasi

Adanya produk inovatif berupa makanan olahan untuk camilan atau snack yang disukai semua kalangan dengan kandungan protein ikan yang lebih sehat dan tidak mengandung bahan pengawet sehingga aman dikonsumsi.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian, analisis dan evaluasi atas 2 (dua) tujuan dan sasaran indikator kinerja utama, menunjukkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan telah berupaya untuk mewujudkan dan mencapai kinerja yang telah dituangkan/ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 dan bertekad untuk membangun sistem akuntabilitas kinerja yang akuntabel melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah (SAKIP). Hal ini dibuktikan dengan adanya komitmen dari jajaran pimpinan yang semakin kuat dan memahami arti pentingnya akuntabilitas kinerja, adanya semangat dari pejabat dan jajarannya untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik, dengan upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta diimplementasikannya

Hasil pengukuran kinerja sasaran menunjukkan bahwa capaian sasaran 1 dapat dikatakan **“Berhasil”** dengan nilai mean sebesar 95. Capaian ini didasarkan pada tercapainya nilai SAKIP, sedangkan sasaran 2 dapat dikatakan **“Cukup”** dengan nilai mean sebesar 82,5.

Secara umum disimpulkan bahwa realisasi kinerja tahun 2025 terhadap target yang tercantum dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, Indikator Kinerja Utama (IKU), khususnya pada sasaran 2 sulit tercapai. Oleh karena itu, diperlukan dukungan untuk mencapai keberhasilan indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan, dengan upaya :

1. Memperhatikan realisasi capaian tahunan dengan target yang telah ditentukan, apabila realisasi selalu dibawah target yang telah ditetapkan dapat segera mengusulkan perubahan target dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bapperida dan Inspektorat. Hal ini dikarenakan apabila terdapat target yang tidak tercapai, dapat mempengaruhi capaian target nilai SAKIP.
2. Mengajukan usulan revisi harga acuan ikan Ke Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pekalongan
3. Koordinasi dengan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pekalongan terkait pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
4. Koordinasi dengan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pekalongan terkait

Implementasi Harga Acuan Ikan sepantura Jawa

5. Koordinasi dengan pemilik kapal agar tetap mendaratkan ikannya di TPI Kota Pekalongan
6. Berkoordinasi dengan bagian Hukum Kota Pekalongan terkait isi dan redaksi perwal
7. Merevisi redaksi Peraturan Wali Kota Pekalongan yang mengatur tentang pengelolaan TPI dan retribusi TPI sesuai masukan dari bagian Hukum Setda Kota Pekalongan.
8. Mengupayakan agar Peraturan Wali Kota Pekalongan yang mengatur tentang pengelolaan TPI dan retribusi TPI segera diundangkan

Melalui upaya diatas, diharapkan dapat meningkatkan nilai produksi / produksi perikanan dimasa yang akan datang.

Pekalongan, 14 Februari 2026.

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KOTA PEKALONGAN

**BAMBANG SUGIARTO,S.T.,M.M.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19710304 199903 1 011

## LAMPIRAN

**IKU PERUBAHAN 2021-2026**

DRAFT

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2024**

DRAFT